

**JADWAL PENYELENGGARAAN SEMINAR FIKN 3
TAHUN 2017**

Waktu	ID paper	Judul Paper	Penyaji	Pembahas 1	Pembahas 2
SELASA, 23 MEI 2017					
KELAS A					
08.00-08.30	Registrasi				
08.30-09.00	Pembukaan				
09.00-10.00	2	analisis pengaruh e-procurement dalam mengurangi korupsi pengadaan barang dan jasa pada kementerian keuangan	Dwi Ari Wibawa dan Sutiono	Mila Mumpuni	Heru Subiyantoro
10.00-11.00	5	Pengaruh Sasaran Kerja Pegawai terhadap Kinerja - Komitmen, Umpan Balik, dan Kompleksitas Tugas sebagai Variabel Pemoderasi	Hindri Asmoko dan Hari Sugiharto		
11.00-12.00	19	Implementasi model pembelajaran blended e-learning pada diklat pengadaan barang/jasa di bppk	Bambang Sancoko, Hasan Ashari	Heru Subiyantoro	Mila Mumpuni
12.00-13.00	ISHOMA				
13.00-14.00	8	Studi Komparasi Kompetensi Pemimpin Menurut Goleman dkk. Dan Menurut Kementerian Keuangan	Anies Said Basalamah	Heru Subiyantoro	Mila Mumpuni
KELAS B					
08.00-08.30	Registrasi				
08.30-09.00	Pembukaan				
09.00-10.00	13	Efisiensi alokasi dalam penganggaran berbasis kinerja (studi pada pusdiklat anggaran dan perbendaharaan tahun anggaran 2011 sampai 2015)	Sumadiyah Triwidiantini Olfah	Agus Sunarya Sulaeman	Rd. Tatan Jaka Tresnajaya
10.00-11.00	14	Implementasi e-purchasing dalam proses pengadaan barang dan jasa satuan kerja	Jamila Lestyowati		
11.00-12.00	6	Peran earmarked grants dalam menstimulasi pertumbuhan ekonomi regional melalui kesehatan fiskal daerah	Imam Sumardjoko dan M. Heru Akhmadi	Rd. Tatan Jaka Tresnajaya	Agus Sunarya Sulaeman
12.00-13.00	ISHOMA				
13.00-14.00	4	Perbandingan biaya penerbitan sp2d pada dua kppn tipe A1 non ibukota provinsi	Widhayat Rudhy Windarta dan Muchamad Amrullah	Rd. Tatan Jaka Tresnajaya	Agus Sunarya Sulaeman
RABU, 24 MEI 2017					
KELAS A					
08.00-08.30	Registrasi				
08.30-09.30	12	Uang Saku RDK, haruskah dipotong pajak?	Ali Said	Yuniarto Hadiwibowo	Agung Budilaksono
09.30-10.30	3	Analisis persistensi inflasi di provinsi papua barat	Azwar Iskandar dan Achmat Subekan		
10.30-11.30	11	Akuntabilitas kepatuhan pada prinsip syariah dalam pengelolaan surat berharga syariah negara (sukuk negara)	Erny Arianty	Agung Budilaksono	Yuniarto Hadiwibowo
11.30-12.30	ISHOMA				
12.30-13.30	20	Seberapa pentingkah Sertifikasi Bendahara?	Subarja	Agung Budilaksono	Yuniarto Hadiwibowo
KELAS B					
08.00-08.30	Registrasi				
08.30-09.30	15	Tinjauan aspek formal penerapan self assessment system pada pajak daerah	Amin Subiyakto	Rd. Tatan Jaka Tresnajaya	Khamami Herusantoso
09.30-10.30	16	Metode checksum sebagai langkah meyakini dokumen elektronik dalam pemeriksaan pajak	Maulia Githa Ustadztama		
10.30-11.30	21	Bagaimana mendorong industri perikanan menggunakan kebijakan perpajakan yang tepat	Mohammad Djufri, ST. MSI.	Khamami Herusantoso	Rd. Tatan Jaka Tresnajaya
11.30-12.30	ISHOMA				
12.30-13.30	1	The Application User Satisfaction Analysis Saiba on Sater K/L Territory of Jakarta	Tohirin, Mukhtaromin	Khamami Herusantoso	Rd. Tatan Jaka Tresnajaya
13.30-14.30	9	E-spt dan e-filing dari perspektif undang-undang informasi dan transaksi elektronik	Agus Suharsono		

ANALISIS PENGARUH E-PROCUREMENT DALAM MENGURANGI KORUPSI PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA KEMENTERIAN KEUANGAN

Dwi Ari Wibawa ¹⁾, Sutiono ²⁾

1) Pusdiklat Anggaran Dan Perbendaharaan bwcahklaten@gmail.com

2) Pusdiklat Anggaran Dan Perbendaharaan sutiono.bp2k@gmail.com

Abstract

This research aims to test the influence of the application of e-procurement against the reduction of corruption in the procurement of goods and services. This research using a sample of procurement officials in the I Echelon Ministry of Finance. The research of using multiple linear regression analysis. The result is that information transparency and symmetrical proved able to reduce corruption in government procurement of goods and services.

Keywords: e-procurement, korupsi, transparansi, monopoli, informasi yang simetris

PENGARUH SASARAN KERJA PEGAWAI TERHADAP KINERJA - KOMITMEN, UMPAN BALIK, DAN KOMPLEKSITAS TUGAS SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI

Hindri Asmoko¹, Hari Sugiharto²

¹Balai Diklat Kepemimpinan, Jalan Alun-alun Utara Nomor 2, Magelang, Jawa Tengah

Email: hindriasmoko@gmail.com

²Balai Diklat Kepemimpinan, Jalan Alun-alun Utara Nomor 2, Magelang, Jawa Tengah

Email: harisgh67@gmail.com

ABSTRACT

Tujuan

Tulisan ini bertujuan untuk menguji pengaruh penetapan sasaran kerja pegawai terhadap kinerja. Selanjutnya pengaruh antar variabel ini diuji lebih lanjut dengan memasukkan variabel komitmen terhadap tujuan, umpan balik, dan kompleksitas tugas sebagai variabel pemoderasi.

Desain/Methodologi

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan relasional dan kausalitas. Data penelitian diperoleh dari hasil survei dengan menyebarkan kuesioner kepada responden. Populasi penelitian adalah para pejabat eselon IV Kementerian Keuangan dengan sampel pejabat eselon IV yang sedang mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan selama Tahun 2016 di Balai Diklat Kepemimpinan. Pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi.

Temuan/Hasil

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sasaran kerja pegawai mempunyai pengaruh terhadap terhadap kinerja. Lebih lanjut, penelitian ini juga menunjukkan variabel komitmen terhadap tujuan, umpan balik, dan kompleksitas tugas memperkuat pengaruh sasaran kerja pegawai terhadap kinerja tersebut.

Kata Kunci: Sasaran Kerja, kinerja, komitmen, umpan balik, kompleksitas tugas.

Purpose

The purpose of this research is to investigate the effect of determining job target on performance. Futhermore, the influence between thes variable is test by incorporating goal commitment, feedback, and task complexity as moderating variabel.

Research Methodology

The research method used is quantitative research with relational and causal approach. Data collect via survey. The population is the echelon IV officials of Ministry of Finance with a sample of echelon IV who attending Leadership Trainning during 2016 at Balai Diklat Kepemimpinan. Hypothesis testing using regression analysis.

Findings

Our evidence reveals that determing job target affect performance. Futhermore, the study also show that goal commitment, feedback, and task complexity reinforce the influence of determining job target on performance.

Key Words: Job target, performance, commitment, feedback, task complexity.

IMPLEMENTAS MODEL PEMBELAJARAN *BLENDED E-LEARNING* PADA DIKLAT PENGADAAN BARANG/JASA DI BPPK

Bambang Sancoko¹⁾, Hasan Ashari²⁾

¹ Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan
email: bambangbahagia@gmail.com

² Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan
email: hasantugas@gmail.com

Abstract

Tujuan - Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan Diklat Pengadaan Barang/Jasa menggunakan metode blended learning. Penulis ingin mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung proses pelaksanaan diklat dengan metode blended learning.

Metode Penelitian - Penelitian ini memfokuskan proses pelaksanaan diklat Pengadaan Barang/Jasa yang diselenggarakan pada triwulan I tahun 2017. Data penelitian berasal dari data sekunder yang bersumber dari Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Diklat Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2017. Data penelitian diolah dengan menggunakan metode deskriptif kuantitatif.

Temuan/Hasil - Dalam proses pelaksanaan metode blended learning untuk diklat Pengadaan Barang/Jasa, peserta diklat tidak melaksanakan proses belajar mandiri secara optimal. Hal ini menyebabkan pelaksanaan diklat Pengadaan Barang/Jasa dengan blended learning tidak mencapai hasil yang optimal.

Rekomendasi - BPPK sebaiknya meningkatkan pengelolaan komunikasi dengan para stakeholder terkait diklat Pengadaan Barang/Jasa. Selanjutnya, BPPK juga harus memperbaiki sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan proses belajar mandiri.

Manfaat - Dengan penelitian ini diharapkan ada penyempurnaan pada proses pelaksanaan diklat dengan metode blended learning sehingga program pengembangan kapasitas dan kompetensi pegawai pemerintah khususnya di Kementerian Keuangan dapat mencapai hasil yang optimal.

Kata Kunci: *blended learning, belajar klasikal, belajar mandiri.*

Purpose - This research aims to find out how the implementation of the “Diklat Pengadaan Barang/Jasa” process by blended learning method. The researchers will identify the factors that support the implementation process of the training with blended learning method.

Research Methodology - This study focuses on the process of implementing the “Diklat Pengadaan Barang/Jasa” held in the first quarter of 2017. The research data comes from secondary data sourced from the Monitoring and Evaluation Report of the Implementation of “Diklat Pengadaan Barang/Jasa” in 2017. The research data is processed by using quantitative descriptive method.

Findings - In the process of implementing the blended learning method for the “Diklat Pengadaan Barang/Jasa”, the training participants do not implement the optimal self-paced learning process. This causes the implementation of “Diklat Pengadaan Barang/Jasa” blended learning program did not achieve optimal results.

Recommendations - BPPK should improve the management of communication with stakeholders related to the “Diklat Pengadaan Barang/Jasa”. Furthermore, BPPK should also improve the facilities and infrastructure supporting the implementation of self-paced learning process.

Value - With this research, it is expected that there will be improvement on the implementation process of the training with blended learning method so that the government officials capacity and competency building program especially in Ministry of Finance can achieve optimal result.

Keywords: *blended learning, classical learning, self-paced learning.*

Studi Komparasi Kompetensi Pemimpin Menurut Goleman dkk. dan Menurut Kementerian Keuangan

Anies Said Basalamah

Kepala Pusdiklat Pengembangan Sumber Daya Manusia

asbasalamah@yahoo.com

Abstrak

Goleman, Boyatzis dan McKee (2008) mengembangkan empat dimensi kecerdasan emosional yang secara rinci dibagi menjadi 18 kompetensi sebagai kompetensi yang perlu dimiliki pemimpin. Sementara itu Kementerian Keuangan juga mengembangkan 35 kompetensi berperilaku. Penelitian kepustakaan ini mencoba membandingkan apakah kompetensi menurut Kementerian Keuangan tersebut ada padanan teoretisnya dengan kompetensi menurut Goleman, Boyatzis dan McKee. Dari penelitian ini tampak bahwa kompetensi menurut Goleman, Boyatzis dan McKee seluruhnya ada dalam kompetensi menurut Kementerian Keuangan, sedangkan 12 kompetensi menurut Kementerian Keuangan tidak ada dalam kompetensi menurut Goleman, Boyatzis dan McKee. Satu-satunya kompetensi yang tidak ada dalam daftar kompetensi menurut Goleman, Boyatzis dan McKee dan tidak dapat dijelaskan sebagai kompetensi kognitif maupun teknis tetapi merupakan kompetensi menurut Kementerian Keuangan adalah negosiasi. Karena negosiasi adalah juga kompetensi (McShane dan Von Glinow, 2010), maka dapat disimpulkan bahwa negosiasi merupakan satu-satunya kekurangan dari daftar kompetensi yang ada dalam kecerdasan emosional menurut Goleman, Boyatzis dan McKee.

Kata kunci: Kecerdasan emosional, reformasi birokrasi, kompetensi berperilaku, standar kompetensi jabatan.

Abstract

Goleman, Boyatzis and McKee (2008) proposed four dimensions of emotional intelligence broken down into 22 competencies needed by leaders. Meanwhile, the Ministry of Finance also developed 35 behavioral competencies. This literature review compares whether these 35 competencies have theoretical background as those of Goleman, Boyatzis and McKee. This research indicates that all competencies according to Goleman, Boyatzis and McKee are enlisted in the competencies according to MOF, but twelve competencies according to MOF are not considered as competencies according to Goleman, Boyatzis and McKee. The only competency that is not listed by Goleman, Boyatzis and McKee and cannot be explained neither as cognitive nor technical competency but considered as competency by MOF is negotiation. Since negotiation is also a competency (McShane and Von Glinow, 2010), it can be concluded that negotiation is the only shortage in the list of competencies in the emotional intelligence according to Goleman, Boyatzis and McKee.

Keywords: Emotional intelligence, bureaucratic reform, behavioral competencies, soft competency, positional competencies standard.

**EFISIENSI ALOKASI DALAM PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA
(STUDI PADA PUSDIKLAT ANGGARAN DAN PERBENDAHARAAN TAHUN
ANGGARAN 2011 SAMPAI 2015)**

Sumadiyah Triwidiyantini Olfah

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anggaran dan Perbendaharaan

email: st.olfah@gmail.com

Abstract

Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) adalah sistem penganggaran yang menghubungkan antara pendanaan dengan kinerja. Kinerja yang dimaksud dalam PBK adalah output dan outcome yang dihasilkan. Salah satu tujuan penerapan PBK adalah Meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam penganggaran. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui apakah penerapan PBK saat ini sudah sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Dalam penulisan ini mengambil sampel salah satu satuan kerja yakni Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anggaran dan Perbendaharaan dalam masa Tahun Anggaran 2011 sampai 2015. Adapun metode pembahasannya menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Berdasarkan hasil pengolahan data diperoleh hasil bahwa alokasi anggaran pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anggaran dan Perbendaharaan belum mencerminkan adanya peningkatan efisiensi alokasi. Untuk mengetahui apakah terdapat efisiensi alokasi terlebih dahulu harus dibuat standar kinerja serta standar biaya untuk menghasilkan suatu kinerja. Keterbatasan dalam penelitian ini adalah belum dilakukan penelitian secara mendalam mengenai hal-hal yang menyebabkan perbedaan alokasi pada tiap-tiap tahun anggaran. Rekomendasi dalam penelitian ini adalah agar Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anggaran dan Perbendaharaan merumuskan kinerja maupun prosesnya secara terstandar sehingga dapat dilakukan penghitungan alokasi yang lebih akurat. Selain itu hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi baik dalam proses penganggaran seluruh satuan kerja maupun sebagai referensi akademis.

Kata-kata Kunci : *anggaran berbasis kinerja, output, efisiensi, indikator kinerja, standar biaya*

IMPLEMENTASI E-PURCHASING DALAM PROSES PENGADAAN BARANG DAN JASA SATUAN KERJA

JAMILA LESTYOWATI

Balai Diklat Keuangan Yogyakarta
Jl Yogya – Solo Km 11 Purwomartani Kalasan Sleman 55571
jamila.lestyowati@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini mengambil tema bidang pengadaan barang dan jasa. Berdasarkan Perpres nomor 5 tahun 2014, salah satu tugas pejabat pengadaan adalah melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa melalui e-purchasing. Cara ini menggunakan e-catalog dalam proses pemilihan barang dan jasa. E-catalog menampilkan barang dan jasa yang dibutuhkan satuan kerja dengan spesifikasi dan harga yang bersaing. Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan jenis penelitian kualitatif. Metode yang digunakan adalah depth interview kepada pejabat pengadaan dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa kendala dalam penerapan e-catalog. Belum semua barang dan jasa yang dibutuhkan satker terdapat dalam e-catalog. Masih adanya biaya lain di luar harga yang tertera dalam katalog tersebut. Dan pada beberapa situasi harga yang ditawarkan di katalog elektronik lebih tinggi dibandingkan dengan di tempat lain.

Kata Kunci : Pengadaan barang dan jasa, e-catalog, Pejabat Pengadaan,

PERAN *EARMARKED GRANTS* DALAM MENSTIMULASI PERTUMBUHAN EKONOMI REGIONAL MELALUI KESEHATAN FISKAL DAERAH

Imam Sumardjoko ¹⁾, Muhammad Heru Akhmadi ²⁾

¹ Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

email: imamdjo@gmail.com

² Politeknik Keuangan Negara STAN

email: heru.cio@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis peran earmarked grants terhadap pola belanja di daerah dan kontribusinya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi regional. Peningkatan dana transfer ke daerah belum maksimal menanggulangi kesenjangan fiskal dan ekonomi regional yang kompetitif. Penelitian dana transfer di beberapa negara telah dilakukan sebelum pelaksanaan otonomi.

Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif yang bersifat explanatory research dengan model regresi double log with two stage. Analisis melibatkan variabel earmarked grants DAK, DID, DBH serta belanja daerah dan tahap selanjutnya menggunakan PDRB. Data penelitian bersumber dari laporan realisasi APBD dan Laporan Keuangan Transfer Ke Daerah tahun 2013-2015.

Hasil penelitian membuktikan DAK, DID dan DBH berpengaruh terhadap belanja APBD dengan p-value kurang dari 0,05. Pengujian kedua membuktikan belanja APBD memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi regional dengan nilai p-value sebesar 0,038.

Penelitian ini terbatas hanya menggunakan sampel daerah penerima DID tahun 2013-2015. Kebijakan earmarked grants terus disempurnakan untuk memicu belanja produktif sehingga mampu mempertahankan kinerja ekonomi.

Penelitian ini diharapkan menjadi pertimbangan dalam kebijakan pengelolaan keuangan daerah baik di tingkat pemerintah pusat maupun daerah untuk senantiasa mewujudkan kesehatan fiskal.

Keywords : *kualitas belanja, belanja produktif, infrastruktur*

PERBANDINGAN BIAYA PENERBITAN SP2D PADA DUA KPPN TIPE A1 NON IBUKOTA PROVINSI

Widhayat Rudhi Windarta¹⁾, Muchamad Amrullah²⁾

¹⁾Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan
Email : widhayat@gmail.com

²⁾Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan
Email : mas.amrullah@gmail.com

Abstract

Tujuan

Tujuan penelitian untuk mengetahui perbedaan biaya penerbitan SP2D pada KPPN Tipe A1 non ibukota provinsi dengan objek dan lokasi KPPN Bekasi dan KPPN Bogor. Pendekatan penghitungan biaya yang digunakan adalah sistem biaya tradisional.

Metodologi

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelitian arsip. Data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari objek dan lokasi penelitian.

Hasil

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan biaya penerbitan SP2D antara KPPN Bekasi dengan KPPN Bogor. Pada tahun 2013, biaya penerbitan per output SP2D KPPN Bogor 2 kali dari KPPN Bekasi. Pada tahun 2014, biaya penerbitan per output SP2D KPPN Bogor 2,3 kali dari KPPN Bekasi. Pada tahun 2015, biaya penerbitan per output SP2D KPPN Bogor 2,7 kali dari KPPN Bekasi. Penyebabnya adalah jumlah pegawai yang berdampak pada belanja pegawai dan jumlah SP2D yang diterbitkan.

Keterbatasan

Terdapat belanja yang tidak dimasukkan dalam perhitungan biaya penerbitan SP2D. Hal ini disebabkan keterbatasan data.

Rekomendasi

Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang beban kerja pegawai pada dua KPPN tersebut. Beban kerja yang berbeda dapat dijadikan dasar alokasi sumber daya yang berbeda, terutama alokasi sumber daya manusia yang menyumbang biaya terbesar dalam biaya penerbitan SP2D berupa belanja pegawai.

Keywords: *perbandingan, biaya, deskriptif, sekunder, KPPN*

Uang Saku RDK, Haruskah Dipotong Pajak?

Ali Said

Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan
alisaid9173@gmail.com

Abstrak

Kajian ini berawal dari adanya perbedaan pendapat atas penerapan potongan terhadap uang saku rapat dalam kantor. Dengan kajian ini penulis akan mendalami berbagai argumentasi atas penerapan potongan PPh Pasal 21 terhadap Uang Saku Rapat Dalam Kantor. Dengan demikian bisa dicarikan solusi agar penerapan suatu aturan tidak menimbulkan persepsi pelanggaran terhadap aturan lainnya.

Pendekatan yang dilakukan dalam kajian ini adalah pendekatan analisis deskriptif. Penulis melakukan analisis terhadap berbagai pendapat dan aturan-aturan yang mendasari pendapat tersebut. Juga terhadap aturan-aturan yang berkaitan dengan tema yang dikaji.

Uang Saku Rapat Dalam Kantor adalah uang saku yang diterima oleh pegawai atau pihak tertentu yang melakukan rapat di kantor di luar jam kerja, berdasarkan surat tugas atau surat undangan dari penyelenggara rapat tersebut. Pembayaran uang rapat dalam kantor dalam DIPA merupakan akun 524114, sebagai uang perjalanan dinas. Karena uang perjalanan dinas ada yang berpendapat uang saku rapat dalam kantor tidak dipotong PPh pasal 21. Ada pula yang berpendapat bahwa uang saku rapat dalam kantor harus dipotong PPh pasal 21 karena bersifat menambah penghasilan dan tidak ada perjalanan dinas yang dilakukan. Selain itu PPh pasal 21 tidak ada kaitannya dengan kode akun. Penulis berpendapat agar uang saku rapat dalam kantor diberikan kode akun 521213 dan dipotong PPh pasal 21.

Kata kunci: Uang Saku, rapat dalam kantor, PPh pasal 21,

ANALISIS PERSISTENSI INFLASI DI PROVINSI PAPUA BARAT

Achmat Subekan ¹⁾, Azwar ²⁾

¹ Balai Diklat Keuangan Malang
Email : achmatsubekan@gmail.com

² Balai Diklat Keuangan Makassar
Email : azwar.iskandar@gmail.com

Abstrak

Tujuan - Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat persistensi inflasi di Provinsi Papua Barat dan kontribusi persistensi inflasi sejumlah komoditas atau kelompok barang/jasa terhadap pembentukan persistensi di Provinsi Papua Barat. Selain itu, penelitian ini juga akan melihat peranan TPID menjalankan fungsinya dalam pengendalian inflasi di Provinsi Papua Barat.

Desain/Methodologi/Pendekatan - Dengan menggunakan data time series triwulanan tahun 2009 s.d. 2016 yang bersumber dari publikasi Bank Indonesia, penelitian ini mencoba mengestimasi dengan pendekatan Univariate Autoregressive (AR) Model.

Temuan/Hasil - Penelitian ini membuktikan bahwa inflasi di Provinsi Papua Barat memiliki derajat persistensi yang tinggi. Persistensi inflasi yang tinggi mengindikasikan bahwa inflasi membutuhkan waktu yang cukup lama untuk kembali ke nilai alamiahnya setelah adanya shock. Tingginya derajat persistensi inflasi Provinsi Papua Barat tercermin dari lamanya jangka waktu yang dibutuhkan oleh inflasi untuk menyerap 50% shock yang terjadi sebelum kembali ke nilai alamiahnya. Jangka waktu yang dibutuhkan oleh inflasi Provinsi Papua Barat untuk kembali ke nilai alamiahnya yaitu selama 11,5 bulan. Dengan model Partial Adjustment Model (PAM) diketahui bahwa persistensi inflasi Provinsi Papua Barat dipengaruhi oleh shock yang terjadi pada kelompok bahan makanan dan kelompok- kelompok transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebagai kelompok administered price dan kelompok bahan makanan sebagai kelompok volatile foods. Selain itu, keberadaan TPID di Provinsi Papua Barat sebagai upaya untuk mengoordinasikan kebijakan moneter dan fiskal regional dalam rangka mengontrol laju inflasi, terbukti memiliki arah hubungan negatif terhadap inflasi regional di Provinsi Papua Barat.

Rekomendasi/Implikasi Penelitian - Berdasarkan hasil estimasi, tingginya derajat persistensi inflasi di Provinsi Papua Barat antara lain diakibatkan oleh tingginya derajat persistensi inflasi yang terjadi pada kelompok volatile food dan kelompok administered price. Hal ini berimplikasi bahwa koordinasi para pemangku kebijakan di bidang terkait, dalam hal ini Bank Indonesia, Pemerintah Daerah dan TPID, harus dioptimalkan lagi. Pengendalian inflasi di daerah tidak cukup hanya melakukan pengendalian secara parsial yang fokus pada kelompok komoditas tertentu yang dianggap memberikan kontribusi besar dalam pembentuk inflasi daerah, tetapi juga hendaknya melihat seluruh kelompok komoditas secara simultan.

Keywords - persistensi, inflasi, Papua Barat, dan TPID.

**AKUNTABILITAS KEPATUHAN PADA PRINSIP SYARIAH DALAM
PENGELOLAAN SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA
(SUKUK NEGARA)**

Erny Arianty

Pusdiklat Keuangan Umum

ernyarianty@yahoo.com

ABSTRAK

Tujuan Penelitian: Penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauh mana praktik akuntabilitas khususnya akuntabilitas kepatuhan pada prinsip syariah dalam pengelolaan Surat Berharga Syariah Negara diterapkan dan menganalisis faktor-faktor yang dapat mendukung terwujudnya akuntabilitas tersebut.

Metode: Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan melakukan wawancara ke beberapa informan yang bertugas di Direktorat Pembiayaan Syariah dan juga melakukan observasi untuk melihat praktik-praktik dalam pengelolaan SBSN.

Hasil penelitian: Hasil penelitian secara umum pengelolaan SBSN telah memenuhi kepatuhan pada prinsip syariah walaupun masih ada beberapa bagian dari proses yang masih perlu penyempurnaan, diantaranya perlu adanya opini dari DSN-MUI terhadap penggunaan dana SBSN untuk kesesuaian pada prinsip syariah, perbaikan akuntansi dalam hal pencatatan amortisasi diskon/premium ketika penerbitan SBSN (selama ini menggunakan akun bunga). Ada beberapa faktor yang mendukung terwujudnya akuntabilitas tersebut, yaitu komitmen manajemen, otoritas pemerintah, pelatihan, dan koordinasi/kerja sama internal.

Batasan Penelitian: Penelitian ini memiliki keterbatasan waktu dalam melakukan observasi dan terbatasnya informan yang diwawancarai sehingga masih banyak informasi yang belum dapat diperoleh sehingga karya tulis ini masih memerlukan penyempurnaan.

Rekomendasi: Akuntabilitas Kepatuhan pada prinsip syariah dalam setiap tahapan dan proses pengelolaan harus diwujudkan yang bertujuan untuk meningkatkan tingkat kepercayaan dari masyarakat khususnya investor.

Manfaat: Hasil penelitian ini akan meminimalkan risiko dari ketidakpatuhan pada prinsip syariah

Keywords: Akuntabilitas, Kepatuhan Syariah, SBSN.

Seberapa pentingkah Sertifikasi Bendahara?

Subarja

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anggaran dan Perbendaharaan

email: subarja2004@gmail.com

Purpose-*Writing aims to analyze the various possible steps and government policies that can be done in the implementation of certification treasurer.*

Methodology-*The study was conducted with a qualitative approach through the study of applicable rules and supported by previous research data.*

Findings *Certification for treasurer both treasurer of expenditure and treasurer of acceptance have been arranged in PP Nomor 45 Tahun 2013 and the latest by Perpres Nomor 7 Tahun 2016 and its operational rules. Establishment of this rule of course as a guide in the execution of certification treasurer so that can be done with the best. In carrying out activities that the source of funds from the state budget must be seen cost and benefit and priority programs that must be implemented immediately. This is due to the limited existing fiscal capacity, so it really should be calculated and analyzed which ones are priority or which programs are not priority.*

Limitations *It's more focused on studying existing rules in the face of the current problems and finding alternative policies to be implemented. But it has not been supported by real data on the funding needs required for certification activities as well as a comprehensive cost benefit analysis.*

Recommendations-*The treasurer certification activity as an activity should also be assessed, whether it will be continued now, will not be implemented, or will be implemented in the future. If it will be implemented also today, it must be examined with the most efficient method to be implemented. If it will not be implemented at this time or in the future, of course the existing rules must be changed and adjusted. And if it will be implemented in the future, of course this should be submitted to all work units, given the existing rules are now widespread throughout Indonesia.*

Additional Benefits-*With this study, it will be clear what steps will and can be implemented by policy makers in particular to follow up on the treasurer certification activities.*

Keyword: Certification, treasurer, important

TINJAUAN ASPEK FORMAL PENERAPAN SELF ASSESSMENT SYSTEM PADA PAJAK DAERAH

Amin Subiyakto¹⁾

¹ Balai Diklat Keuangan Yogyakarta
amin.subiyakto@gmail.com

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak. Pemberlakuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah mengubah cara pembayaran sebagian besar pajak daerah yang semula menggunakan Official Assesment System menjadi Self Assesment System. Cara pembayaran pajak yang secara konsepsional menurut para ahli adalah bentuk yang paling ideal untuk dijadikan pola pemungutan pajak, ternyata dalam aspek legalnya perlu diperhatikan sehingga bisa sejalan dengan dinamika di lapangan.

Tipe penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan fokus penelitian yaitu analisis kelengkapan ketentuan dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 terkait penerapan efektivitas Self Assesment System dalam pemungutan pajak daerah yang dilihat komponen proses penerapan self assesment yang diatur dalam Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu study pustaka dan dokumentasi dengan teknik pengolahan data berupa editing, kategorisasi dan penafsiran. Analisis data yang digunakan dengan melakukan reduksi, penyajian dan verifikasi data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penerapan Self Assesment System Pajak Daerah dari aspek hukum formal dengan mengacu pada aspek legal terkait ketentuan formal penerapan self assesment pada pajak pusat masih belum memadai bahkan terdapat ketidaksesuaian di beberapa peraturan.

Keywords: *Self Assessment System, Official Assessment System, aspek material. aspek formal.*

METODE CHECKSUM SEBAGAI LANGKAH MEYAKINI DOKUMEN ELEKTRONIK DALAM PEMERIKSAAN PAJAK

Maulia Githa Ustadztama
Pusat Pendidikan Pelatihan Pajak
mauliagitha@gmail.com

Abstract

Tujuan - Tulisan ini dibuat untuk menjelaskan secara efektif tentang pembahasan istilah data elektronik atau dokumen elektronik serta mengenai keaslian dan keutuhan data yang dikelola secara elektronik atau dokumen elektronik dalam proses pemeriksaan pajak.

Desain/metodologi/pendekatan - Tulisan disusun dengan dengan metode penelitian deskriptif dan bersifat kualitatif. Penulisan menggunakan data yang berbentuk ketentuan normatif berupa peraturan terkait peminjaman data elektronik dan teori yang berlaku umum dalam disiplin ilmu Teknologi dan Informasi.

Temuan/Hasil – Data Elektronik yang disebutkan dalam UU KUP saat ini dikenal dengan istilah Dokumen Elektronik sebagaimana disebutkan dalam UU ITE. Untuk menangani Dokumen Elektronik dalam proses pemeriksaan terkait keaslian dan keutuhan data dapat digunakan metode Checksum. Checksum dengan algoritma MD5, merupakan sebuah metode deteksi kesalahan saat transmisi data elektronik, yang digunakan sebagai cara untuk meyakini keutuhan dan keaslian data karena efisien.

Keterbatasan Penelitian – Penulisan ini hanya membahas metode Checksum dengan algoritma MD5 dan aplikasi metode checksum yang digunakan memiliki fitur yang sederhana.

Rekomendasi/Implikasi Penelitian – Metode Checksum menjadi pedoman dalam penanganan dokumen elektronik sebagai bagian dalam proses pemeriksaan yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.

Orisinalitas/Nilai Tambah/Manfaat – Pembahasan tentang dunia teknologi dan informasi dalam bidang penegakan hukum pajak dapat lebih ditingkatkan untuk mengikuti perkembangan sektor usaha wajib pajak dan mengoptimalkan kinerja DJP.

Keywords: pemeriksaan pajak, peminjaman data elektronik, checksum

BAGAIMANA MENDORONG INDUSTRI PERIKANAN MENGGUNAKAN KEBIJAKAN PERPAJAKAN YANG TEPAT

Mohammad Djufri, ST. MSi.

Pusdiklat Pajak – Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan
mhd.djufri@gmail.com

Abstrak

Indonesia dianugerahi kekayaan alam berupa sumber daya perikanan yang sangat melimpah, khususnya perikanan laut, baik perikanan tangkap maupun budidaya laut. Berbagai kebijakan yang mendukung pengembangan industri perikanan ini sangatlah diperlukan, tak terkecuali kebijakan perpajakan. Dalam kajian ini akan dibahas kebijakan perpajakan terkait sektor perikanan, dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan menggunakan Teori Economic Analysis of Law dari Richard A. Posner sebagai pisau analisis. Mengingat pembahasan kebijakan perpajakan dalam sektor perikanan sangatlah luas, dalam kajian ini hanya akan dibahas terkait jenis Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Hasil dari kajian terungkap bahwa kebijakan perpajakan terhadap produk perikanan belum memenuhi harapan bagi perkembangan industri perikanan. Untuk itu, dalam kajian ini Penulis mencoba memberi gambaran bagaimana sebaiknya kebijakan perpajakan khususnya di bidang PPN yang dapat mendorong industri perikanan ini.

Keywords : *Pajak Sektor Perikanan, Economic Analysis of Law, Posner.*

ANALISIS TINGKAT KEPUASAN PENGGUNA APLIKASI SAIBA PADA SATKER K/L WILAYAH JAKARTA

Tohirin, Mukhtaromin

Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan, Jalan Raya Puncak KM 71, Bogor, Jabar

tohirinak@gmail.com; muhtar74@gmail.com

Abstract

Research on the Application User Satisfaction Analysis Saiba on Satker K/L Territory of Jakarta aims to determine the level of satisfaction satker K/L using Saiba application and determine the factors in the application Saiba is lacking and needs to be improved. Research conducted on 85 carriers Saiba application in the Jakarta area. The research activities carried out in October to November 2016. Data and information obtained from the survey results were processed using two methods of descriptive statistical analysis and the importance performance analysis (IPA). From the results of this study concluded that overall, the value of the performance factor of the application is still below than expected, as shown in the gap entirely value greater than zero. Factors that should be improved in accordance with the result IPA Saiba application is a complete help menu in the application supporting Saiba if there are problems encountered when running the application Saiba (E1) and a security system database (B2).

Keywords: *satisfaction, SAIBA, IPA, improvement priorities*

E-SPT DAN E-FILING DARI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Agus Suharsono
BDK Yogyakarta, BPPK
email: gusharpramudito@gmail.com

Abstract

Perkembangan sarana teknologi informasi yang sangat pesat tidak dapat dihindari akan menyentuk semua sisi kehidupan bernegara termasuk dalam pelaporan pajak secara online. Wajib Pajak yang menggunakan e-Filing dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 terus meningkat, tahun pajak 2014 mengalami kenaikan yang sangat signifikan sebesar 60% dibanding tahun sebelumnya, tahun pajak 2015 telah mencapai 5,5 juta. E-SPT dan e-Filing adalah objek hukum Undang-Undang ITE, tulisan ini menganalisis e-SPT dan e-Filing dari perpektif Undang-Undang ITE. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normative dengan pendekatan undang-undang, konsep, dan analisis. Data yang dibahas adalah data sekunder berupa sumber hukum primer, sekunder, dan tertier. Teknik pengumpulan datanya dengan studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian diketahui bahwa Undang-Undang ITE mengatur bahwa Penyelenggara Transaksi Elektronik wajib menggunakan jasa Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Indonesia yang sudah tersertifikasi. Namun sertifikat elektronik untuk e-SPT dan e-Filing diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Selain itu, Undang-Undang ITE mengatur bahwa system elektronik yang digunakan harus disepakati para pihak, hal ini tidak terjadi pada e-SPT dan e-Filing. Penelitian e-SPT dan e-Filing dari perspektif Undang-Undang ITE belum banyak dilakukan. Jika masalah tersebut diuji dengan asas dan tujuan Undang-Undang ITE maka sebaiknya Undang-Undang ITE perlu memberi kewenangan khusus kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk memberi Sertifikat Elektronik, tidak harus pihak ketiga dan perlu ditambahkan aturan khusus agar Direktorat Jenderal Pajak diberi wewenang khusus untuk menyediakan aplikasi pelaporan pajak tanpa harus ada kesepakatan dengan Wajib Pajak.

Keywords: e-SPT, e-Filing, Undang-Undang ITE